

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN *BINARY OPTION* YANG MENYESATKAN DI SOSIAL MEDIA

Oleh  
Dody Albert  
NIM. 180574201052

## Abstrak

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran iklan didefinisikan sebagai siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap konsumen akibat iklan *binary option* yang menyesatkan di sosial media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap konsumen akibat iklan *binary option* yang menyesatkan di sosial media. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Adapun Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah dan menganalisis berbagai Undang-Undang ataupun peraturan terkait permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyampaikan kesimpulan yaitu perlindungan hukum bagi konsumen atas *iklan binary option* yang menyesatkan ada 2 macam yaitu (1) Perlindungan hukum konsumen yang bersifat *preventif* yang mana dapat dilakukan dengan melalui legislasi/regulasi yakni dengan cara memberikan aturan hukum yang akan menjamin bahwa konsumen dapat menerima perlindungan hukum dan melalui pengawasan konsumen baik dari pemerintah, masyarakat, maupun oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, (2) Perlindungan hukum konsumen yang bersifat *represif*, yakni perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akibat adanya gugatan dari konsumen yang merasa dirugikan. Dua cara yang dapat dilalui yakni melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukankonsumen atau melalui non peradilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Iklan *Binary Option*, Sosial Media.

# **LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST MISLEADING BINARY OPTION ADVERTISING ON SOCIAL MEDIA**

**By**  
**Dody Albert**  
**NIM. 180574201052**

## ***Abstract***

*Legal protection is the protection of dignity, as well as the recognition of human rights owned by legal subjects based on legal provisions. Article 1 point 5 of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, advertising broadcasts are defined as broadcasts of commercial information and public services regarding the availability of services, goods and ideas that can be utilized by the public with or without compensation to the broadcasting institution concerned. What legal protection can be given to consumers due to misleading binary option advertisements on social media. The purpose of this study is to determine the legal protection that can be given to consumers due to misleading binary option advertisements on social media. The theory used in this research is the Theory of Legal Protection. The research method used by researchers is a normative legal research method. The research approach that researchers use in this study is a statutory approach (statute approach). The statutory approach (statute approach) is an approach by examining and analyzing various laws or regulations related to the legal issues studied. Based on the results of the analysis and discussion that has been carried out, the researcher concludes that there are 2 types of legal protection for consumers for misleading binary option advertisements, namely (1) Preventive consumer legal protection which can be carried out through legislation/regulation, namely by providing rule of law that will guarantee that consumers can receive legal protection and through consumer supervision both from the government, the community, and by non-governmental consumer protection agencies, (2) Repressive consumer legal protection, namely legal protection given to consumers when a dispute occurs between business actors with consumers due to lawsuits from consumers who feel aggrieved. There are two ways that can be passed, namely through the judiciary by filing a lawsuit to the judiciary at the consumer's domicile or through non-judicial, namely through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).*

**Keywords :** *Legal Protection, Binary Options Advertising, Social Media.*